

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Bicara soal stunting tidak hanya persoalan kesehatan semata, namun lebih jauh menandakan adanya ketimpangan yang terjadi dimasyarakat atas ketidakmampuan mengakses kesehatan yang layak dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi anak dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya masalah stunting hendaknya masih menjadi prioritas utama sejalan dengan tujuan SDG's (*Sustainable Development Goals*) poin ke dua yakni mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta sebagaimana termaktub dalam 17 tujuan Pembangunan global yang disusun dan disetujui oleh negara yang tergabung dalam organisasi dunia yakni PBB atau Perserikatan Bangsa-bangsa.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat anak stunting tertinggi kedua di Asia Tenggara yakni sebesar 19,8% atau setara dengan 4.482.340 balita masih menjadi persoalan nasional yang belum terselesaikan (PMK, 2025). Brebes menjadi salah satu dari 35 Kabupaten/Kota dengan kasus stunting tertinggi di Jawa Tengah yakni dengan Prevalensi tertinggi kedua mencapai 29,1% pada tahun 2022 dan perlahan turun menjadi 23,1% ditahun 2024. Berdasarkan data yang diperoleh melalui EPPGBM jumlah stunting di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 sebanyak 12.144 kasus dari 98.643 ribu anak yang tercatat di Posyandu. Angka ini naik dari tahun sebelumnya di tahun 2023 yakni sebanyak 10.410 dari 65.643 anak balita se kabupaten Brebes.

Tren kenaikan stunting di Kabupaten Brebes secara data dipengaruhi oleh adanya kebijakan mewajibkan penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari Dinas Sosial mengikuti pemeriksaan kesehatan di Posyandu sesuai dengan komponen bantuan yang diterima. Misalkan mendapatkan bantuan komponen Balita maka wajib orang tua balita tersebut wajib mengikuti pemeriksaan di Posyandu Balita setiap bulan. Jika prosentase kehadiran mengikuti pemeriksaan dibawah 85% maka bantuan akan ditangguhkan karena dianggap tidak komitmen terhadap kebijakan tersebut.

Selain dipengaruhi oleh sistem pendataan yang kian tertib, stunting di Brebes faktor yang menjadi faktor tingginya angka stunting di Brebes adalah angka kemiskinan di Kabupaten Brebes yang cukup tinggi. Menurut BPS tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes Tahun 2024 adalah sebanyak 15,60%, dengan nilai absolut adalah 283,280 jiwa berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ke makanan bergizi sehingga berakibat pada anak tumbuh dengan kekurangan gizi sebagaimana yang seharusnya. Faktor kedua yakni Rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat Brebes dimana

angka Rata-rata Lama Sekolah 2024 di Kabupaten Brebes adalah 6,41 tahun. Artinya sebagian besar kepala rumah tangga di Kabupaten Brebes adalah lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, ini berpengaruh pada pengambilan keputusan mengenai makanan apa yang akan dikonsumsi keluarga.

Dalam kajian teori politik kesejahteraan oleh Karl Polanyi dalam penelitian dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh negara hendaknya dikembalikan kepada rakyat untuk menciptakan kesejahteraan. Bentuk redistribusi sumberdaya yang dimaksud dapat berupa program dan kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, sehingga mampu secara mandiri memenuhi kebutuhannya. Sebab, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk akses pangan, sandang dan pangan yang layak. Kasus stunting yang terjadi di Brebes merupakan cerminan masih adanya ketimpangan dimasyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang baik.

Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian yaitu adanya peningkatan kasus stunting di Brebes ditengah upaya yang dilakukan pemerintah Brebes apabila dilihat menggunakan teori *Politics of care* dari Joan C Tronto. *Politics of care* dari Tronto ini melihat bahwa perawatan bukan sebagai hanya urusan pribadi yang bersifat privat, namun aktivitas politik yang sarat kekuasaan dan kepentingan. Berdasarkan hasil analisis data yang ada, kerapuhan politik kesejahteraan di Brebes dalam menangani stunting sudah ada sejak proses pertama yakni *care about* dimana identifikasi dan pemenuhan kebutuhan hanya dilihat dari yang terlihat dan tercatat dalam EPPGBM namun tidak melihat kebutuhan lain yang lebih struktural dan kompleks yakni kemiskinan ekstrem dan Pendidikan yang masih rendah. Serta tidak dilibatkannya Masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan yang sesungguhnya. Pelaksanaan proses kedua yakni *care for* juga disimpulkan bahwa dalam penanganan stunting di Brebes belum menunjukkan perawatan yang baik.

Hal ini dibuktikan dengan pengambilan tanggung jawab oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penganggaran masih belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan, yakni tidak lebih dari 1% dari APBD Kabupaten Brebes yang menyentuh angka 3 Triliun lebih pertahun serta kesejahteraan dan insentif kader posyandu yang jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan beban kerja yang diemban. Proses pelayanan sebagai implementasi proses ketiga yakni *care giving* berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari kerjasama lintas sektoral dan adanya partipasi masyarakat yakni FATAYAT dan NA sebagai organisasi perempuan yang anggota-anggota nya juga terlibat melakukan pelayanan sebagai kader-kader posyandu di tiap kecamatan. Kekurangan lainnya dalam fase ini adalah minimnya

ketersediaan posyandu remaja, dimana remaja putri yang menjadi sasaran intervensi pencegahan stunting justru belum mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

Kemudian proses terakhir yakni *care receiving* evaluasi dari program yang telah dilakukan berdasarkan sudut pandang penerima manfaat program. Pelaksanaan proses ini juga menunjukkan adanya ketidakpedulian dalam penanganan stunting. Argumen ini dibuktikan dengan tidak adanya *feedback* atau umpan balik dari penerima manfaat. Sebagai contoh program Pemberian Makanan Tambahan kepada balita stunting, yang mendapatkan bantuan makanan bukan karena butuh tapi karena jatah nya menerima sebagai imbalan datang periksa ke posyandu. Idealnya dalam proses akhir ini muncul identifikasi kebutuhan baru setelah dievaluasi karena terlewat pada proses awal. Kemudian evaluasi program Pemberian TTD bagi remaja putri yang tidak ada satupun Lembaga/kelompok penanggung jawab memonitoring kepatuhan remaja putri dalam meminum tablet tersebut.

5.2 Implikasi

Tingginya angka kasus stunting di Kabupaten Brebes dan banyaknya program yang dilakukan meskipun secara pravelensi SSGI turun, nyatanya kondisi dilapangan menunjukkan tren peningkatan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah tren kenaikan kasus stunting yang terjadi ditengah upaya penurunan stunting merefleksikan program-program penanganan stunting di Brebes menjadi tidak maksimal sebab tidak didukung oleh praktek *politic of care* yang baik didalamnya. Setiap fase yang dilakukan dilapangan masih ditemukan kurang nya keseriusan dan kepedulian sehingga pelaksanaan program hanya berjalan sebatas formalitas dan menggugurkan kewajiban melakukan program kerja.

Menurut kacamata kesehatan hendaknya dalam menjalankan program kesehatan antara upaya kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif berjalan bersamaan dan proporsional. Berbicara kesehatan adalah sebuah investasi jangka Panjang, maka program yang seharusnya diutamakan adalah preventif dan promotif fokus pada yang sehat. Sebab jika upaya kuratif yang diutamakan memang cukup efektif menurunkan angka stunting namun tidak memutus rantai stunting dimasa depan.

Penelitian ini tentang Politik kesejahteraan berdasarkan *cross case comparison*. Penelitian ini secara spesifik membahas implementasi teori *politics of care* dalam penanganan stunting di Kabupaten Brebes dengan menganalisis sejauh mana kepedulian ini menjadi aspek fundamental dalam program yang dijalankan di masyarakat